

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Secara umum, istilah yang lebih dikenal dengan kesejahteraan sering diartikan sebagai berikut: keadaan kesejahteraan (konsep pertama), yaitu keadaan pemenuhan semua kebutuhan hidup, terutama kebutuhan dasar, misalnya pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Definisi kesejahteraan juga berlaku untuk semua kegiatan pengorganisasian dan distribusi pelayanan sosial kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama pada kelompok yang kurang beruntung. Pelaksanaan berbagai sistem perlindungan sosial contohnya termasuk inisiatif formal dan informal kegiatan sosial (Suharto, 2005).

Kesejahteraan sosial meliputi tiga hal utama konsep, yaitu (Suharto, 2005):

1. Suatu kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik, mental dan sosial;
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan nilai sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang bergerak di bidang ekonomi Kesejahteraan Sosial dan Layanan Sosial;
3. Tindakan, yaitu tindakan atau usaha yang terorganisasi untuk mencapai keadaan sejahtera.

Undang Undang Kesejahteraan Sosial No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial merupakan prasyarat terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial

warga negara agar dapat hidup memadai dan mampu mengembangkan potensi diri, sehingga dapat memenuhi kewajiban fungsi sosialnya (Fahrudin, 2018).

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terencana, terstruktur serta berkesinambungan yang dilakukan oleh Pemerintah negara maupun daerah daerah dan Masyarakat secara tepat sasaran dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terencana, terstruktur serta berkesinambungan yang dilakukan oleh Pemerintah negara maupun daerah daerah dan Masyarakat secara tepat sasaran dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Adapun tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya dan menepatkan dirinya di tengah-tengah lingkungan sosial. Tujuan dari Kesejahteraan sosial lainnya adalah untuk sebagai berikut:

- 1) Supaya bisa memenuhi semua kebutuhan dasar seseorang: memiliki sandang, papan, pangan, kesehatan, dan ikatan sosial yang selaras dengan lingkungannya.
- 2) Supaya bisa mencapai kondisi keseimbangan psikologis, terutama dalam hubungannya dengan orang-orang di sekitar kita. Misalnya

dengan mengeksplorasi sumber-sumber yang memiliki peluang, meningkatkan standar hidup, dan sebagainya (Fahrudin, 2018).

2.1.3 Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi masalah yang dihasilkan dari perubahan sosial-ekonomi dan menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah 4 (Empat) fungsi kesejahteraan sosial yang disebutkan oleh Friedlander (1961), yaitu:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Tujuan dari kesejahteraan sosial sebagaimana dengan fungsinya adalah untuk ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga dan Masyarakat untuk menghindari masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, usaha pencegahan ditekankan melalui kebijakan ataupun kegiatan untuk membantu menciptakan pola hubungan sosial yang baru dan institusi sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Intensi dari kesejahteraan sosial adalah untuk menghilangkan kondisi kondisi ketidakmampuan yang dimiliki seseorang seperti halnya kecacatan dalam fisik, kelemahan pada emosional maupun sosialnya. Sehingga mereka yang mengalami masalah-masalah yang disebutkan tadi dapat berfungsi normal kembali dalam Masyarakat. Fungsi ini juga termasuk fungsi pemulihan atau rehabilitasi.

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Pengembangan masyarakat juga termasuk kedalam fungsi dari kesejahteraan sosial. Fungsi ini memberikan kontribusi secara langsung atau juga tidak langsung pada konstruksi atau pengembangan struktur sosial dan sumber daya yang dimiliki oleh Masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini meliputi kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan sektor atau bidang pada pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.

Keempat fungsi yang telah dijelaskan tersebut menjadi salah satu rujukan dalam praktik pekerjaan sosial agar para praktisi atau akademisi tidak bingung dengan tugas seorang pekerja sosial. Sehingga seorang pekerja sosial yang baik harus benar-benar cakap dalam mengetahui isu permasalahan sosial pada level mikro, mezzo maupun makro.

2.1.4 Usaha Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan adalah tatanan kehidupan dan sosial, material, dan spiritual, penuh rasa aman, kesusilaan dan kedamaian jasmani dan rohani agar setiap warga negara dapat berusaha sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial bangsa, diri, keluarga dan masyarakat membela hak asasi manusia dan tugas manusia.

UU No 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwasanya usaha kesejahteraan sosial adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Itu artinya merupakan upaya terarah, terpadu dan berkesinambungan yang dilaksanakan beberapa

pihak seperti oleh Pemerintah dan juga Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Bahkan Friedlander (dalam Fahrudin, 2018) mengemukakan bahwa:

“Usaha Kesejahteraan sosial yaitu sebagai suatu kegiatan yang terorganisasi terutama dan berkaitan secara langsung dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesejahteraan Masyarakat, pendidikan, rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan” (Fahrudin, 2018).

Dari pernyataan di atas dapat membantu memahami kita mengenai klasifikasi metode praktik pekerjaan sosial, sebagaimana yang kita ketahui pekerjaan sosial ini dibagi menjadi 3 metode yaitu: *Social Case Work* (Terapi individu dan keluarga), *Social Group Work* (Bimbingan sosial kelompok), dan *Community Organizing / Community Development* (Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat).

2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat meliputi konsep pembangunan masyarakat (*community development*) serta pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Sehubungan dengan pengertian tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami arti dan makna dari pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat. Pemberdayaan pada konteks sosial adalah kemampuan individu untuk menyatu dengan masyarakat serta menciptakan keberdayaan bagi masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat

adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan berkembang serta maju secara dinamis. Pemberdayaan masyarakat merupakan segala usaha untuk mengangkat harkat dan martabat strata sosial masyarakat yang saat ini terjebak dalam kondisi kemiskinan serta keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan berarti memampukan dan memberdayakan masyarakat.

Dalam konsep pemberdayaan, manusia merupakan subjek dari dirinya sendiri (Priyono & Pranarka, 1996). Proses pemberdayaan menekankan pada proses pemberdayaan masyarakat dengan cara memotivasi atau mendorong individu agar memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menentukan pilihan dalam hidupnya. Ia juga menjelaskan bahwa pemberdayaan harus menyasar kepada kelompok atau strata sosial yang kurang mampu. Pemberdayaan adalah upaya membangun kekuatan dalam diri dengan cara memelihara, mempromosikan, memotivasi, membangkitkan serta berusaha untuk terus mengembangkan potensi dirinya. Apalagi dengan mengupayakan upaya tersebut potensi atau kekuatan masyarakat itu sendiri akan semakin menguat dan meningkat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu penguatan yang biasa disebut dengan *community selfreliance* atau kemandirian (Huraerah, 2008). Dalam proses ini, masyarakat dibantu untuk menganalisis masalah yang mereka hadapi, membantu masyarakat untuk mencari solusi alternatif permasalahan tersebut, dan mempresentasikan strategi yang mereka miliki dengan memanfaatkan setiap kemampuan serta keterampilan yang berbeda.

2.2.2 Faktor Ketidakberdayaan

Pemberdayaan muncul akibat adanya kondisi ketidakberdayaan, dan juga terdapatnya kelompok kurang mampu atau lemah. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya mencakup di bawah ini:

- 1) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, ataupun etnis.
- 2) Kelompok lemah khusus, contohnya adalah manula, anak-anak, remaja, penyandang cacat, *gay*, lesbian dan masyarakat yang terasing.
- 3) Kelompok lemah secara personal, yaitu bagi mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Kondisi ketidakberdayaan ini dicirikan oleh beberapa faktor seperti: kurangnya aksesibilitas terhadap jaminan ekonomi, kurangnya pengalaman dalam arena politik, tidak adanya akses terhadap informasi, tidak tepenuhinya dukungan finansial, tidak ada pelatihan-pelatihan dan adanya ketegangan fisik maupun emosional (Suharto, 1997).

Selain itu, kondisi ketidakberdayaan yang terdapat dalam diri seorang individu atau kelompok secara luas ini dapat disebabkan karena faktor kurangnya pengetahuan, adanya kegagalan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan kurangnya kesempatan dalam membuat keputusan sendiri.

Adapun indikator-indikator pemberdayaan yang dapat menunjukkan bahwa seseorang itu berdaya atau tidak yaitu:

- 1) Tercapainya kebebasan mobilitas, yaitu mengacu pada kemudahan seseorang untuk meninggalkan negara atau wilayah tempat tinggalnya untuk mencari pengalaman baru.
- 2) Kemampuan untuk mendapatkan kebutuhan dasar Daya beli seseorang adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan keluarganya. Terutama jika dia mampu melakukannya dari kantong sendiri.
- 3) Kemampuan untuk mendapatkan kebutuhan dasar Daya beli seseorang adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan keluarganya. Terutama jika dia mampu melakukannya dari kantong sendiri.
- 4) Mampu berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan keluarga dan menunjukkan kemampuan untuk melakukannya sendiri atau bekerja sama dengan pasangannya.
- 5) Memiliki kebebasan relatif dari dominasi keluarga, kondisi dimana seseorang ditanya apakah ada anggota keluarga dekat (suami, istri, anak, mertua) yang pernah mengambil uang, tanah, perhiasan, atau melarang mereka untuk memiliki anak atau bekerja di luar rumah.
- 6) Melek politik dan hukum; mengetahui perlunya akta nikah dan aturan waris; mengetahui nama pejabat pemerintah desa, anggota DPRD, dan nama presiden.

- 7) Terlibat dalam aktivisme politik termasuk ikut serta dalam kampanye dan unjuk rasa.
- 8) Memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarga secara finansial dengan mengumpulkan sumber daya termasuk rumah, tanah, aset produktif, dan tabungan.

2.2.3 Pemberdayaan dalam Pekerjaan Sosial

Dari awal pekerjaan sosial sudah bercirikan memberdayakan orang. Terdapat ungkapan lama yang menyatakan bahwa pekerja sosial bertujuan “*to help people to help themselves*”, yaitu membantu orang untuk dapat membantu dirinya sendiri. Ini berarti bahwa pekerjaan sosial tidak menolong orang untuk menerima bantuan dan terus bersandar pada bantuan orang lain, melainkan ialah membangkitkan kemampuannya untuk dapat berdiri sendiri.

Seseorang dapat mempraktikkan pekerjaan sosial melalui berbagai cara, yang pertama, yaitu secara langsung dengan berinteraksi dengan klien secara tatap muka dalam suatu kelompok, dan yang kedua adalah kondisi dimana seseorang dapat mempraktikkan pekerjaan sosial secara tidak langsung dengan berfokus pada lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kesejahteraan sosial, atau penilaian, analisis, dan pengembangan program kesejahteraan sosial. Dalam kebanyakan situasi, pekerja sosial menggunakan metode tidak langsung ketika berinteraksi dengan anggota masyarakat. Namun, ada beberapa aspek keterlibatan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan langsung. Misalnya, pekerja sosial sering kali menyumbangkan layanan mereka untuk membantu

kelompok lokal dan organisasi, Gilbert, Miler, dan Specht (dalam Fahrudin, 2018).

Terdapat 3 metode yang saat ini digunakan yaitu metode mikro, mezzo, dan makro (Fahrudin, 2018). Metode menunjukkan “bagaimana” membantu, yaitu kegiatan instrumental yang bertujuan dan berencana yang melalui kegiatan ini tugas-tugas dilaksanakan dan tujuan-tujuan yang dicapai. Dalam praktik pekerjaan sosial, metode menunjukkan penggunaan secara teratur atas cara-cara sumber-sumber, dan prosedur-prosedur, melalui pelaksanaan jenis peranan-peranan pertolongan seperti sebagai konselor, penasihat, pemungkin, konsultan, administrator, Guru, pembimbing, model, perencana, Peneliti, dan sebagainya, Siporin (dalam Fahrudin, 2018).

Metode terdiri atas pelaksanaan perencanaan interventive yang mengikuti prosedur yang melaksanakan tugas-tugas seperti *engagement*, perumusan kontrak, *assessment*, perencanaan, dan pelaksanaan intervensi.

Klasifikasi ketiga metode pekerjaan sosial ke dalam tabel berikut menurut Ashman (dalam Huraerah, 2010):

Tabel 1.0 Level dan Metode Intervensi

No	Level Intervensi	Unit Intervensi	Metode Intervensi
1	Mikro	Individu	<i>Individual Casework</i>
2	Mikro/Mezzo	Keluarga	<i>Family Casework</i>
3	Mezzo	Kelompok	<i>Groupwork</i>
4	Makro	Organisasi & Komunitas	<i>Community Organizing / Community Development</i>

Sumber: Huraerah, 2010

2.3.4 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitator adalah tenaga atau pelaksana pemberdayaan masyarakat. Selain itu ada pula yang menggambarkan dirinya sebagai “agen perubahan” (*change agent*), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat, berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi (Lipit, 1958). Oleh karena itu fasilitator harus bersikap professional, dalam arti memiliki kualifikasi tertentu baik dalam hal kepribadian, pengetahuan, sikap dan keterampilan memajukan pemberdayaan masyarakat.

Fasilitator atau tenaga atau pendamping masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga sering disebut fasilitator masyarakat (*community facilitator/CF*) karena pekerjaannya lebih sebagai pendorong, menggerakkan, memajukan, katalisator, motivator masyarakat, sedangkan pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat itu sendiri. Pendampingan sebagai sebuah skema yang umumnya digunakan oleh pemerintah dan lembaga *non-profit* dalam usaha peningkatan nilai dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga nantinya sanggup dalam mengidentifikasi dirinya sebagai salah satu bagian dari permasalahan yang dialami dan berusaha untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dialami. Kapabilitas sumber daya manusia sangat terpengaruh oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu, benar-benar dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan

merupakan satu strategi yang memastikan keberhasilan atas suatu program pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2005).

2.3 Konsep Kewirausahaan Sosial

2.3.1 Pengertian Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan Sosial atau *Social Entrepreneurship* adalah orang yang berkiprah memenuhi misinya dan menggunakan konsep-konsep kegiatan kewirausahaan untuk memberikan nilai sosial kepada mereka yang kurang beruntung melalui wirausaha mandiri secara finansial dan berkelanjutan (Saifan, 2012). *Social Entrepreneurship* adalah proses menghasilkan bisnis dengan keterampilan kewirausahaan serta melalui pendekatan inovatif untuk memecahkan masalah sosial. Bisnis ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ganda dari dampak sosial dan kemandirian finansial/profitabilitas (Sengupta & Sahay, 2018). Kewirausahaan sosial menjadi kegiatan yang dapat menggerakkan lingkungan sekitarnya untuk sama-sama mendapatkan keuntungan baik dalam segi ekonomi maupun sosialnya.

2.3.2 Unsur Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan Sosial dapat dikatakan sebagai bentuk kegiatan profit, non-profit atau lembaga filantropi/sektor sosial publik bahkan kondisi gabungan dari semua definisi tersebut. Kewirausahaan sosial memiliki unsur yang membuatnya berbeda dengan konsep pada kewirausahaan sosial pada umumnya. Hal ini lah yang membuat kewirausahaan memiliki unsurnya sendiri. Oleh karena itu unsur utama kewirausahaan sosial, yaitu:

1. *Social Society*, unsur ini merupakan unsur yang tidak sering terdapat pada konsep kewirausahaan pada umumnya. Unsur ini bertujuan untuk selalu menghasilkan manfaat sosial yang dapat terasa oleh masyarakat secara langsung.
2. *Civil Society*, elemen ini merupakan elemen pendukung yang sangat penting ketika diperlukan inisiatif dan inovasi dalam penyelenggaraan kewirausahaan sosial yang timbul dari adanya pemikiran-pemikiran masyarakat terhadap permasalahan sosial. Keterlibatan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya sosial yang ada dapat menjadi alasan pentingnya elemen ini dalam proses *social entrepreneurship*.
3. *Inovation*, kegiatan kewirausahaan pada umumnya melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan berbagai inovasi atau gagasan kreatif yang dihasilkan melalui campuran antara aspek budaya, moral dan norma yang ada di dalam lingkungan sosial.
4. *Economic Activity*, kewirausahaan diharuskan mampu menyamakan antara kegiatan ekonomi dengan kegiatan sosial. Hal ini bertujuan untuk mendorong kesinambungan misi sosial di masa depan dengan menciptakan kondisi sosial yang memiliki aktivitas ekonomi secara mandiri (Sofia, 2015).

Perbedaan yang mencolok antara kewirausahaan sosial dengan kewirausahaan pada umumnya membuat makna dari kewirausahaan sosial ini unik. Keunikan yang dimiliki di dalam konsep kewirausahaan sosial ini

dikarekanakan terdapat 4 (empat) faktor yang membuat kewirausahaan sosial berbeda dengan bentuk kewirausahaan lainnya (Saifan, 2012), diantaranya:

1. *Mission-driven*, yaitu mereka mengarah pada misi dalam memberikan nilai sosial kepada masyarakat.
2. Mereka berkerja dengan kombinasi karakteristik yang berbeda, dibandingkan dengan wirausaha konvensional.
3. Mereka bertindak dalam kumpulan yang memiliki budaya inovasi dan keterbukaan yang kuat.

2.3.3 Peran Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan Sosial menyumbangkan peran yang cukup membantu dalam menurunkan tingkat permasalahan sosial yang ada. Dampak perubahan dilakukannya kegiatan ini yaitu kewirausahaan sosial hampir sama dengan yang dirasakan oleh berbagai negara lainnya. Bentuk dari kewirausahaan sosial mengenai nilai-nilai sosial tercantum dalam beberapa poin yang dikemukakan oleh (Santosa, 2007) sebagai berikut:

1. Membantu mengentaskan kemiskinan

Supaya bisa mendapatkan keuntungan, maka sangat penting bagi setiap usaha perusahaan untuk menggunakan sebagian dari uang yang dihasilkan supaya diberikan kepada masyarakat dalam bentuk amal, memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke kebutuhan hidup. Perusahaan wirausaha sosial dapat memberikan bantuan di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan kesehatan. Perlu diketahui bahwa kegiatan kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh entitas kewirausahaan

sosial berbeda dengan bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dalam hal memerangi kemiskinan dan menghasilkan bagi perusahaan, seorang wirausaha social hendaknya bisa memprioritaskan keduanya.

2. Membantu menciptakan lapangan pekerjaan

Prospek wirausahawan baru dapat muncul berdasarkan adanya tindakan kewirausahaan karena para pelaku usaha termotivasi untuk mencari prospek baru. Dengan demikian, hasil usaha akan meningkat sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat berkat peningkatan aktivitas kewirausahaan. Sebagai hasil dari peningkatan produksi masyarakat, setiap usaha akan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk melatih dan mendidik pekerja serta meningkatkan kondisi kerja sehingga dapat mendorong kewirausahaan sosial.

3. Membantu penerapan adanya inovasi dan kreasi gagasan usaha

Kewirausahaan secara luas didefinisikan sebagai kapasitas untuk memproduksi dan mengakomodasi penciptaan usaha, dimana kewirausahaan itu sendiri memiliki bagian yang penting dalam kerangka ekonomi. Peningkatan produksi terjadi dikarenakan adanya ide-ide inovatif *social entrepreneurship* dalam menanggapi meningkatnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa. Seorang *social entrepreneurship* dapat mencapai hal ini karena mereka sangat memperhatikan konteks sosial tempat usaha mereka beroperasi.

4. Membantu meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi

Pengusaha yang memiliki misi sosial akan dapat berkontribusi pada ekonomi sosial masyarakat setempat. Dengan adanya inisiatif berbasis pemberdayaan dapat membantu memacu penciptaan bisnis yang dapat membantu ekonomi berkembang secara berkelanjutan dengan menyediakan berbagai jenis bantuan yang diberikan oleh lembaga kewirausahaan sosial sehingga membantu memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat yang merupakan bagian dari *social entrepreneurship*. Dengan melakukan kegiatan secara teratur dan berulang hal ini berarti bahwa masyarakat dapat merasakan kepuasan dengan kehidupan mereka lebih dari satu kali. Sebagai bonus tambahan, pemberdayaan akan bisa membantu mencapai alokasi yang lebih adil dari sumber daya manusia yang ada sehingga penggunaan sumber daya ini akan optimal, dan bisa menghindari penumpukan tenaga kerja yang tidak efisien.

2.4 Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri.

Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah paada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara.

2.4.1 Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

2.4.2 Proses Pembukuan pada Usaha Mikro

Pembukuan adalah sebuah proses pencatatan yang dilakukan secara wajib dan teratur dalam mengakumulasikan semua jenis data dan informasi tentang keuangan yang terdiri atas kewajiban, penghasilan, harta, biaya dan modal. Jumlah nilai pemberian serta pendapatan barang atau jasa, diakhiri dengan penyusunan kas harian dan buku besar berupa neraca, serta laporan laba rugi sesuai periode tahun tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28. Mengenai pembukuan yang telah dijabarkan dalam UU menekankan pada seluruh pengusaha tentang pentingnya pembukuan. Sebab pembukuan pada internal perusahaan merupakan dasar utama yang menjadi fondasi dari sistem akuntansi. Pada sistem akuntansi tercatat dapat diketahui pergerakan keuangan perusahaan secara rinci.

- A. Dua sistem pembukuan yang umum digunakan di dunia usaha dan organisasi lainnya adalah sistem pembukuan masukan-tunggal dan

pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan masukan-tunggal hanya menggunakan akun pendapatan dan pengeluaran, dicatat terutama di dalam jurnal pendapatan dan pengeluaran. Pembukuan masukan-tunggal cocok digunakan untuk usaha mikro dan kecil. Pembukuan berpasangan memerlukan pengeposan (pencatatan) tiap-tiap transaksi dua kali.

- B. Sistem masukan tunggal, Sumber catatan pembukuan primer di dalam pembukuan masukan-tunggal adalah buku kas, sama dengan daftar rekening koran, tetapi menempatkan pendapatan dan pengeluaran ke berbagai akun pendapatan dan pengeluaran. Catatan akun yang terpisah dipelihara untuk kas mungil, status keterbayaran dan keterterimaan akun, dan transaksi-transaksi yang bersesuaian lainnya, semisal inventaris dan ongkos perjalanan.
- C. Buku besar (dikenal pula sebagai buku masukan akhir) adalah catatan semua akun, masing-masing dicatat pada halaman terpisah dengan neracanya. Tidak seperti jurnal yang menampilkan semua transaksi keuangan tanpa neraca, buku besar mengikhtisarkan nilai-nilai dari satu jenis transaksi keuangan per akun, yang menjadi dasar bagi lembaran neraca dan rekening pendapatan. Buku besar terdiri dari:
- 1) Buku besar konsumen, untuk transaksi keuangan dengan seorang konsumen (juga disebut buku besar penjualan).
 - 2) Buku besar pemasok, untuk transaksi keuangan dengan seorang pemasok (juga disebut buku besar pembelian).

- 3) Buku besar umum (nominal) menyajikan modal, utang, pendapatan, dan pengeluaran.

2.4.3 Tujuan Pembukuan

Pembuatan pembukuan keuangan memiliki tujuan yaitu untuk memahami jumlah kerugian maupun keuntungan yang terjadi pada perusahaan dalam jangka waktu tersebut. Segala transaksi yang terjadi dapat dilihat secara rinci termasuk keseluruhan jalur pembagian barang dan uang di perusahaan, sehingga pengusaha bisa mengetahui estimasi keuntungan dan kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pada pencatatan disetiap proses transaksi yang berlangsung akan memperoleh sejumlah angka yang bisa diperlihatkan tinggi rendahnya pertumbuhan keuanngan yang terjadi dalam perusahaan. Dari pencatatan tersebut mampu memperoleh sebuah gambaran sebagaimana kondisi dari sebuah bisnis yang dilaksanakan selama ini dan menjadi acuan bagi pemilik untuk mengambil keputusan selanjutnya.

Berbagai laporan yang disediakan oleh proses akuntansi dapat menyatukan indikator utama keuangan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kesadaran terhadap arus kas dalam bisnis dan profitabilitas aktual. Informasi ini didapatkan dari pembukuan yang memang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pendapatan dan pengeluaran pada akhir periode akuntansi. Pencatatan setiap transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, barang dan kas harus dilakukan dalam pembukuan. Setelah data dari pembukuan telah terkumpul, proses akuntansi akan mengolahnya menjadi pernyataan yang mengungkap gambaran bisnis yang lebih besar.

2.5 Konsep Kemandirian Ekonomi

2.5.1 Pengertian Kemandirian

Istilah “kemandirian” berasal dari kata dasar “diri” yang terdiri dari awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata “diri”, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa terlepas dari pembahasan mengenai perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah *self*, karena diri itu adalah pusat dari kemandirian (Desmita, 2014).

Istilah kemandirian berarti percaya pada kemampuan serta kapabilitas diri sendiri dalam memecahkan permasalahan tanpa perlu mendapatkan bantuan dari orang lain. Orang yang mandiri sebagai individu mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ia hadapi, mampu menentukan keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif tanpa melupakan lingkungan disekitarnya. Menurut beberapa ahli “kemandirian” mengacu pada keterampilan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung oleh kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas dalam mengatur kebutuhannya sendiri (Eti, 2011).

Kemandirian dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab atas kehidupan sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri, dan mengatasi kesulitan tanpa bergantung pada orang lain. Hal ini dapat berarti mencapai kemandirian dari orang tua atau pengasuh lainnya serta memiliki kemampuan untuk bertindak atas kemauan dan keyakinan sendiri, tanpa terpengaruh oleh faktor eksternal atau membutuhkan persetujuan dari orang lain, adalah definisi

lain dari kemandirian. Untuk memiliki keterampilan ini, seseorang harus dapat mempertimbangkan apa yang terjadi dari suatu tindakan ketika bertindak atau tidak bertindak, tetapi juga biaya dan risiko yang terlibat.

2.5.2 Aspek Kemandirian

Kemandirian adalah kemampuan seseorang dalam berperilaku sesuai keinginannya. Menurut Masrun, kemandirian ditunjukkan dalam beberapa bentuk (Fatimah, 2008), yaitu:

- a. Tanggungjawab, yaitu untuk kemampuan memikul tanggungjawab, menyelesaikan suatu tugas, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, kemampuan menjelaskan peranan baru, memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan salah dalam berfikir dan bertindak.
- b. Otonomi, ditunjukkan dengan mengerjakan tugas sendiri, yaitu suatu kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan kehendak orang lain dan tidak bergantung pada orang lain dan memiliki rasa percaya diri dan kemampuan mengurus diri sendiri.
- c. Inisiatif, ditunjukkan dengan kemampuan berfikir dan bertindak secara kreatif.
- d. Kontrol Diri, ditunjukkan dengan pengendalian tindakan dan emosi mampu mengatasi masalah dan kemampuan melihat sudut pandang orang lain.

2.5.3 Ciri-ciri masyarakat mandiri

Kemandirian merupakan kemampuan untuk bertindak berdasarkan penilaian sendiri dan juga menerima tanggung jawab atas hasil dari pilihan tersebut. Makna lain dari kemandirian adalah tidak adanya ketergantungan yang tidak sehat pada orang lain, yang mencakup kemampuan untuk membuat keputusan sendiri dan mengurus kehidupan sendiri. Kemandirian individu adalah proses yang berkembang dari waktu ke waktu, bukan sebuah tujuan yang dapat dicapai pada saat tertentu dalam kehidupan seseorang. Benny Susetyo menjelaskan bahwa seseorang dikatakan mandiri secara ekonomi apabila memiliki 5 aspek (Susetyo, 2006):

a. Bebas hutang konsumtif

Ada dua jenis hutang jika dilihat dari kegunaannya. Pertama, hutang produktif, yaitu hutang yang dibelanjakan untuk kebutuhan yang dapat menambah penghasilan seseorang. Misalnya, untuk memulai usaha, untuk membeli tanah, untuk sekolah dan sebagainya. Kedua, hutang konsumtif, yaitu hutang yang dibelanjakan untuk kebutuhan yang tidak menambah penghasilan, misalnya membeli hp atau mobil untuk mengikuti gaya hidup.

b. Memiliki Keyakinan dalam bisnis

Pada saat keadaan relatif tenang atau ketika bisnis sedang lesu, seseorang haruslah memiliki keyakinan untuk tidak mudah terpancing untuk mengubah haluan. Hal ini selalu terjadi, tidak peduli seberapa baik atau buruknya bisnis yang dijalankan seseorang akan terus berusaha

mencari pendekatan baru untuk menjembatani kesenjangan dan membangun usaha baru, seseorang akan selalu mencari cara untuk menghemat uang tanpa mengorbankan kualitas bisnisnya.

c. Memiliki Investasi

Investasi adalah tindakan menanamkan modal, energi, ide, atau apa pun ke dalam suatu usaha dengan harapan nilainya akan meningkat. Dalam hal memprediksi bagaimana hasil akhir sebuah proses akan berbeda dengan cara perusahaan beroperasi hingga saat ini, mereka yang memiliki saham finansial di perusahaan dipandang memiliki perspektif yang lebih menyeluruh. Namun ketika investasi tidak berjalan seperti yang di harapkan, tetaplah melakukannya karena hal ini akan memberi sebuah pelajaran berharga.

d. Mampu Mengelola Arus Kas Uang (*cash flow*)

Arus kas uang adalah aliran dana masuk dan aliran dana keluar seseorang. Sebuah arus kas (*cashflow*) dinilai baik apabila pengeluaran seseorang lebih kecil daripada pendapatannya sehingga sisanya bisa ditabung atau diinvestasikan. Arus kas dinilai buruk apabila pengeluaran seseorang lebih besar daripada pendapatannya sehingga untuk memenuhi pengeluaran tersebut, dia akan mencari pinjaman atau menjual asetnya.

e. Siap Mental terhadap Gangguan Finansial

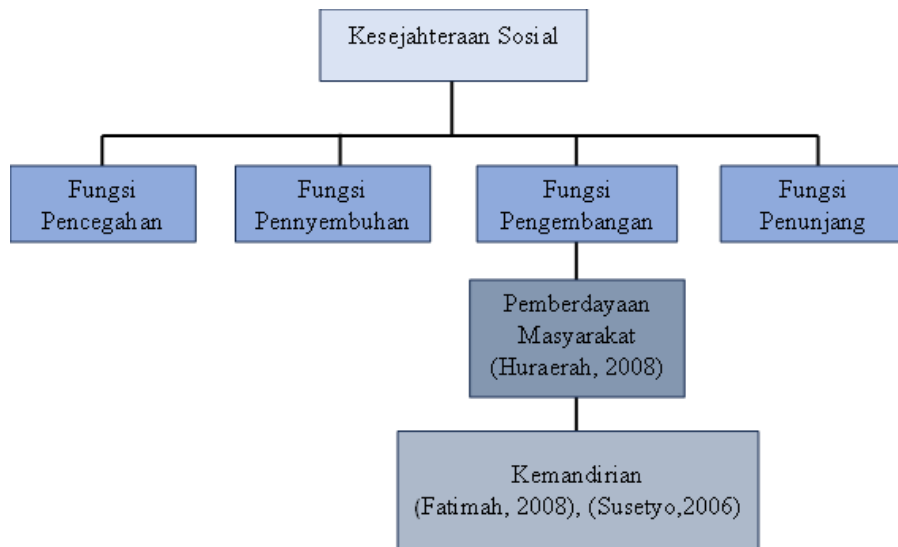
Untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis, seseorang harus memiliki sumber daya material yang diperlukan, seperti uang, pengalaman, tabungan, dan asuransi. Namun, aspek mental lebih penting

bagi keberhasilan seseorang untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Kemampuan untuk pulih dengan cepat dari sebuah kegagalan adalah faktor kunci keberhasilan karena hambatan yang tampaknya tidak dapat diatasi, seperti krisis atau kehilangan orang yang dicintai, dapat menggagalkan usaha yang paling sukses sekalipun. Orang-orang yang memiliki ketahanan mental untuk bangkit setelah setiap kemunduran akan lebih berpeluang dalam mencapai tujuan mereka dibandingkan dengan mereka yang lemah secara mentalitas.

Kemandirian ekonomi telah menjadi suatu keniscayaan atau tuntutan yang harus segera diwujudkan. Ketergantungan pada pihak luar akan selalau menjadi penyebab seseorang atau keluarga tersebut tidak menjadi mandiri dalam perekonomian keluarganya. Kemandirian ekonomi diartikan sebagai bangsa, masyarakat ataupun keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak tergantung pada pihak luar (Avilliani, 2012).

Kemandirian ekonomi adalah tujuan finansial yang paling penting. Kemandirian ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud ini meliputi kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. Kemandirian ekonomi juga dicirikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, antara lain makan, minum, sandang, perumahan atau tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem pemerintahan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar lokal terpenuhi secara adil dan merata di seluruh masyarakat.

Kerangka konseptual adalah hubungan antara teori atau konsep yang ada. Kerangka konseptual merupakan dukungan penelitian yang berfungsi sebagai panduan untuk menyusun penelitian sistematis. Kerangka konseptual menjadi pedoman bagi peneliti untuk dapat menjelaskan secara sistematis dan rinci teori yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan teori-teori yang sudah dibahas di atas maka kerangka konseptual yang disusun dalam penelitian ini dibuat dalam bagan berikut:



Gambar 1.0 Kerangka Konseptual